

DAFTAR PUSTAKA

A.BUKU

- A.Daim, Nuryanto. 2014 . *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Surabaya: Laksbang Justitia
- Anwar, Saiful. 2004 . *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Glora Madani Press
- Busrizalti, M . 2013. *Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya*. Bandung: Total Media
- Hassymzoen, Yusnani, dkk. 2017 . *Hukum Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Karianga, Hendra. 2011 . *Partisipasi Masyarakat Dalam Mengelola Keuangan*. Bandung : PT.Alumni
- Ochtorina, Dyah dan Aan Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono dan Abdurrahman. 2003 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soekanto, Soerjono. 1986 . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).
- Sunarno, Siswanto. 2012 . *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.
- Sunggono, Bambang. 1997 . *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.

B.PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- e. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pelaksanaan Pengalihan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota Yang Menduduki Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- g. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- h. Perka ANRI Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan Atau Pembubaran Lembaga Negara Dan Perangkat Daerah,
- i. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120/253/S4
- j. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat No. 2.1.2/1539/Disdikbud- 2016

C.WEBSITE

[http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf)

[April-2016-38.pdf](http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-38.pdf) diakses pada Selasa, 16 Januari 2017 pukul 11:00

[https://harianhaluan.com/news/detail/63277/kewenangan-sma-beralih--ke-](https://harianhaluan.com/news/detail/63277/kewenangan-sma-beralih--ke-provinsi)

[provinsi](https://harianhaluan.com/news/detail/63277/kewenangan-sma-beralih--ke-provinsi) diakses pada Senin, 5 februari 2018 pukul 04:10

<https://www.metroandalas.co.id/berita-komisi-v-dprd-sumbar-soroti-honor-guru-slt.html> diakses pada Senin, 5 Februari 2018 pukul 11:20

